

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Teori

##### 1. Politik Pendidikan

###### a) Pengertian Politik

Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Dalam kamus berarti *acting or judgeing wisely, welljudged prudent*. Kata politik diambil dari kata latin *politicus* atau bahasa Yunani (Greek) *politicos* yang bermakna *relating to a citizen*. Kata itu berasal juga dari kata polis yang searti dengan city “kota”. *Politic* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu Negara atau terhadap Negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.

Menurut Noer (1997), politik adalah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Dengan kata lain politik yang di maksud oleh Noer adalah hal yang berkenaan dengan suatu kebijakan sistematis yang dirancang untuk dipatuhi dan di ikuti oleh setiap warga negara yang tinggal di dalamnya sehingga roda pemerintahan dapat terlaksana dengan alat yang dinamakan politik ini dan akhirnya politik terlihat menundukkan masyarakat atau dapat juga membuat masyarakat menjadi berontak atas sistem kekuasaan tersebut.

Sedikit berbeda dengan Noer, Budiardjo (2008) berpendapat bahwa, pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politices*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam arti politik disini adalah suatu propaganda sosial yang memuat suatu hal untuk mencapai cita-cita bangsa dengan di dalamnya terdapat suatu pembangunan masyarakat yang di dambakan sebagai bagian dari rekonstruksi sosial politik itu sendiri.

Beberapa keterangan-keterangan yang diberikan Noer, dapat diketahui bahwa politik menurut pendapatnya tidak terbatas pada kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) dan kebijakan umum (*public policies*) seperti pendapat Miriam Budiardjo, tetapi juga mencakup pula kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan struktur masyarakat seperti pergeseran kekuasaan politik dari satu rezim ke rezim lain.

Dalam istilah, kata politik pertama kali dikenal dari buku Plato yang berjudul *politeia*, yang dikenal juga dengan *Republik*. Berikutnya muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politeia*. Kedua karya itu dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari sekian definisi yang ada paling tidak dapat ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik. *Pertama*, pandangan yang mengaitkan politik dengan Negara, yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. *Kedua*, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik (Isaac, 1981: 15-16).

#### b) Hakikat Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

- 1) Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).
- 2) Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
- 3) Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
- 4) Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Jadi dapat dipahami bahwa politik merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam menjalankan roda kekuasaan yang memiliki sistem yang saling mengaitkan antara rumusan kebijakan dan kelangsungan hidup masyarakat yang ada di dalamnya.

### c) Definisi Pendidikan

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “paedagogie” dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “pais” artinya anak dan “again” artinya membimbing, jadi jika diartikan paedagogie artinya bimbingan yang diberikan kepada anak (Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 2007: 67). Dalam bahasa Romawi, pendidikan berasal dari kata “educate” yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan dengan kata “to educate” yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual (Kadir, dkk, 2012: 59).

Secara bahasa definisi pendidikan mengandung arti bimbingan yang dilakukan oleh seseorang (orang dewasa) kepada anak-anak untuk memberikan pengajaran, perbaikan moral dan melatih intelektual. Bimbingan kepada anak-anak dapat dilakukan tidak hanya dalam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah, akan tetapi peran keluarga dan masyarakat dapat menjadi lembaga pembimbing yang mampu menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan.

Berperannya keluarga dan masyarakat dalam melakukan bimbingan pengetahuan, sejalan dengan definisi pendidikan menurut Edgar Dalie yang menjelaskan bahwa pendidikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang (Mulyasana, 2004: 4).

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Sayuti, 2006).

Untuk itu dalam dunia pendidikan, keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan tri pusat pendidikan. Ketiga lembaga ini mempunyai peranan yang sama untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang berbudaya dan berpengetahuan. Dengan adanya sinergitas peran lembaga keluarga, sekolah dan masyarakat dalam memberikan pendidikan akan menciptakan generasi terdidik yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan suatu negara sehingga dapat menghantarkan kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan.

#### d) Hakikat Pendidikan

Saat mencari suatu hakikat, sebetulnya kita akan mulai menyelami sebuah ontologi dalam filsafat. Dalam konteks pendidikan kita akan mengenal filsafat pendidikan yang mana dalam hal ini filsafat pendidikan tidak dapat dilepaskan dari gagasan kita tentang manusia. Mencari hakikat pendidikan adalah menelusuri manusia itu sendiri sebagai bagian pendidikan. Melihat pendidikan dan prosesnya kepada manusia, sebenarnya pendidikan itu sendiri adalah sebagai suatu proses kemanusiaan dan pemanusiaan.

Istilah kemanusiaan secara leksial bermakna sifat-sifat manusia, berperilaku selayaknya perilaku normal manusia, atau bertindak dalam logika berpikir sebagai manusia. Pemanusiaan secara leksial bermakna proses menjadikan manusia agar memiliki rasa kemanusiaan, menjadi manusia dewasa, manusia dalam makna seutuhnya. Artinya dia menjadi riil manusia yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara penuh sebagai manusia (Arfani, 2016: 82-83).

Hakikat pendidikan itu sendiri lebih berorientasi kepada terbentuknya karakter (kepribadian/jatidiri) seseorang. Setiap tahapan pendidikan dievaluasi dan dipantau dengan seksama sehingga menjadi jelas apa yang menjadi potensi positif seseorang yang harus dikembangkan dan apa yang menjadi faktor negatif seseorang yang perlu disikapi. Akar dari karakter ada dalam cara berpikir dan cara merasa seseorang.

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transformasi nilai-nilai maupun materi yang telah diajarkan kepada individu melainkan adanya suatu stimulus yang mendorong individu agar dapat merasakan dirinya sebagai manusia (Pemanusiaan dan Kemanusiaan) yang bertanggung jawab dalam menunaikan kebudayaan terdidik di dalam ruang lingkup yang luas, yakni bermasyarakat.

e) Definisi Politik Pendidikan

Politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara. Tetapi secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa dunia pendidikan harus terpisah atau harus dipisahkan dari dunia politik. Keduanya tidak bisa dicampur menjadi satu karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu, melainkan untuk semuanya (Wirt dan Kirst, 1982). Sementara itu dunia politik lebih mementingkan konstituan (kelompoknya). Platform politik bisa berubah-ubah jika rezim juga berubah. Padahal dunia pendidikan membutuhkan layanan profesional yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan jika dunia pendidikan dicampur dengan dunia politik dikhawatirkan akan terjadi distorsi penyelenggaraan pendidikan.

Politik pendidikan terbagi menjadi empat definisi, yakni: *Pertama*, politik pendidikan adalah metode mempengaruhi pihak lain untuk mencapaitujuan pendidikan. *Kedua*, politik pendidikan lebih berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. *Ketiga*, politik pendidikan berbicara mengenai metode untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat dan sebagainya. *Keempat*, politik pendidikan berbicara mengenai sejauh mana pencapaian pendidikan sebagai pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, pembentuk bangsa yang berkarakter (Supriyoko dalam Amnur, 2007: 5).

Politik pendidikan dimaknai sebagai sebuah endapan politik negara, penjabaran dari tradisi bangsa dan nilai-nilai, serta sistem konsepsi rakyat mengenai bentuk negara dalam sistem pendidikan (Kartono, 1977: 28). Antara tatanan politik suatu bangsa dan

sistem pendidikan terjadi *mutually reinforcing*. Politik pendidikan bertujuan untuk memperjelas arah kemajuan pendidikan demi pembangunan bangsa yang lebih baik ke depan (Kneller: 128).

Politik pendidikan menjadi paduan utama perjalanan pendidikan kebangsaan. Dengan adanya politik pendidikan yang jelas, maka konsep pendidikan yang akan dibentuk dan dicapai akan berada dalam bangunan konsep yang tepat, kuat dan kokoh. Semua itu akan melahirkan sebuah tatanan pendidikan yang mencerahkan. Dapat menghasilkan produk-produk pendidikan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara intelektual maupun sosial. Bagi pemerintah, selaku pemegang kebijakan pendidikan, politik pendidikan akan membuat kebijakan pendidikan lebih beradab dan mencerahkan.

#### f) Politik Pendidikan Paulo Freire

Pengalaman mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadikan apa yang kita pahami dengan jelas hanya sebagai sekedar asumsi. Orang sering menyebutnya sebagai aksioma. Aksioma tersebut berbunyi semua praktik pendidikan tidak bias dilepaskan dari opini-opini para guru yang bersifat teoritis opini-opini tersebut pada gilirannya secara tidak langsung berupa interpretasi tentang apa itu manusia dan dunia, bukan sebaliknya yaitu konsep tentang manusia dan dunia dan dunia menyiratkan perlunya pendidikan. Salah satu bahasan penting dalam konsep manusia itu adalah kejelasan tujuan hidup, bukan sekedar bayang-bayang semu sebagaimana binatang. Jika tujuan hidup binatang untuk beradaptasi dengan alam, maka tujuan hidup manusia adalah memanusiakan (*humanizing*) dunia melalui proses transformasi. Oleh karena itu mengajari manusia dewasa untuk membaca dan menulis harus dilihat, dianalisa dan dipahami dalam kerangka seperti diatas orang yang melakukan analisa secara kritis terhadap metode dan teknik yang diterapkan guru di sekolah akan menemukan kepentingan praxis yang mengingkari nilai filosofis manusia secara tersirat atau tersurat dalam alur berpikir yang koheran atau tidak (Freire, 2007: 82-84).

Bagi Paulo Freire politik pendidikan merupakan dua bagian kata yang menjadi kesatuan makna. Ia menganggap bahwa pendidikan merupakan sebuah *pilot project* dan agen untuk melakukan perubahan sosial guna membentuk masyarakat baru. Menjadikan

pendidikan sebagai *pilot project*, berarti kita berbicara tentang sistem politik kebudayaan (*cultural politics*) yang menyeluruh dan melampaui batas-batas teoritis dari doktrin politik tertentu, serta berbicara tentang keterkaitan antara teori, kenyataan sosial dan makna emansipasi yang sebenarnya. Sehingga sebagai teori sosial yang radikal, wacana politik kebudayaan yang dikembangkan oleh Paulo Freire lebih luas dan lebih fundamental daripada wacana politik yang lain, misalnya teori Marxian klasik. Konsep politik kebudayaan Freire seringkali membingungkan. Sebenarnya, pemikiran politik kebudayaannya mewakili wacana politik yang mula-mula untuk melawan semua bentuk dominasi baik yang bersifat objektif maupun subjektif, serta perjuangan untuk menciptakan pengetahuan, keterampilan dan bentuk-bentuk hubungan sosial yang menjamin adanya emansipasi sosial dan tentu emansipasi individu (Freire, 2007: 5).

Menjadikan manusia sebagai subjek adalah memposisikan manusia sebagai pelaku dalam kehidupan dan memberikan peluang baginya untuk berekspresi dan menentukan sendiri jalan hidupnya tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Dan inilah yang disebut Freire sebagai pendidikan yang membebaskan dan humanis. Sedangkan manusia menjadi objek adalah manusia yang hidup terus bergantung kepada pihak luar, baik manusia maupun alam-eksistensinya terhadap kehidupan tidak ada. Dia hanya sebagai alat untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pihak luar, dirinya disetir oleh orang lain. inilah yang disebut oleh Freire sebagai 'kaum tertindas'. Kaum tertindas disini bisa bermacam-macam. Tertindas sebab rezim yang otoriter, tertindas oleh struktur sosial yang tak adil dan diskriminatif, tertindas karena ras, gender, kulit dan begitupun lainnya.

Hakikat pendidikan selalu mengarah pada tujuan dan impian tertentu disertai dengan praktik yang bersifat politis. Tapi permasalahannya adalah kepentingan politik pendidikan itu untuk apa dan siapa (Freire, 2008: 12). Freire berusaha membongkar watak pasif dari praktik pendidikan tradisional yang melanda dunia pendidikan seperti halnya yang terjadi di sekolah-sekolah. Dia menganggap bahwa pendidikan pasif sebagaimana dipraktikkan pada umumnya melanggengkan "sistem relasi penindasan". Freire mengejek sistem dan praktik pendidikan yang menindas tersebut, yang disebutnya sebagai pendidikan "gaya bank" dimana guru bertindak sebagai penabung yang menabung informasi sementara murid dijejali informasi berupa pengetahuan gurunya untuk disimpan.

Konsep pendidikan tersebut akan memelihara kontradiksi, dan mempertajamnya sehingga mengakibatkan terjadinya kebekuan berpikir dan tidak munculnya kesadaran kritis pada murid. Murid hanya mendengarkan, mencatat, menghafal dan mengulangi ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh guru, tanpa menyadari dan memahami arti dan makna yang sesungguhnya. Inilah yang disebut Freire sebagai kebudayaan bisu (*the culture of silence*). Dan Freire seolah memberi obat untuk menyembuhkan sistem pendidikan (khususnya Amerika Latin) pada saat itu yang terbelang terbelakang dan jauh dari nilai kemanusiaan dan kebebasan manusia itu sendiri dengan menyuguhkan konsep dialog sebagai metodologi pembelajaran dan pembelajaran hadap masalah sebagai bagian dari menuntaskan permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa Freire menganggap politik hadir ditengah pendidikan karena suatu kesatuan yang dinamakan sistem yang kemudian menjadi kebudayaan dalam penyelenggaraan suatu negara. Politik dan pendidikan dapat dianggap saling menunjang dan saling mengisi. Dan keduanya juga saling bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara.

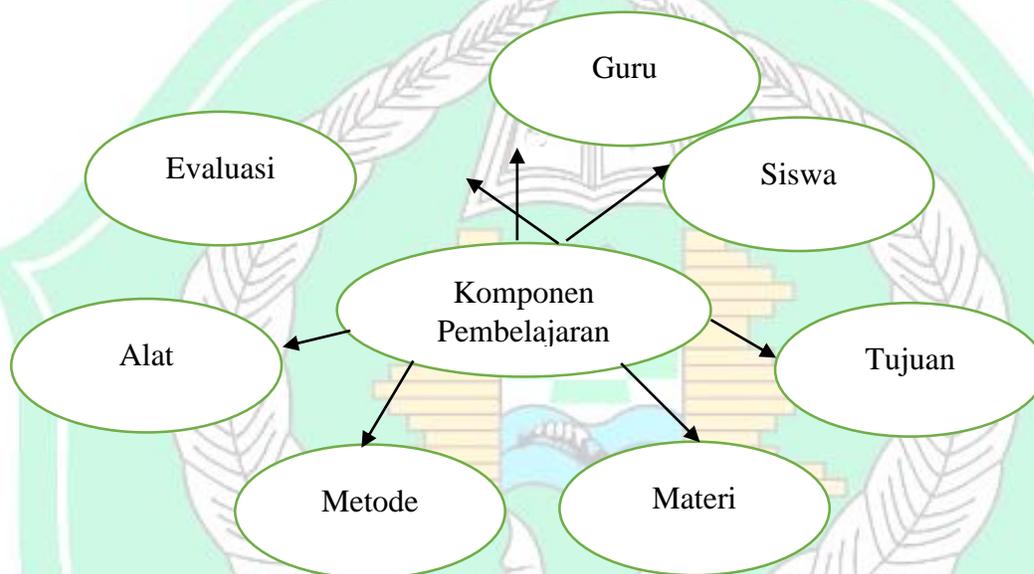
## 2. Komponen Pembelajaran

Dalam kegiatan belajar dan mengajar, peserta didik adalah subjek dan objek dari kegiatan pendidikan. Bagi Freire pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri peserta didik dan dirinya sendiri. Pengenalan itu tidak cukup hanya bersifat objektif atau subjektif tapi harus kedua-duanya. Proses pendidikan merupakan suatu daur bertindak dan berpikir yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidupnya (Freire, 2007). Oleh karena itu makna proses pengajaran adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran.

Tujuan pengajaran akan dicapai apabila peserta didik berusaha secara aktif untuk pencapaiannya. Keaktifan anak didik tidak hanya dituntut dari segi fisik, tetapi juga dari segi kejiwaan. Apabila hanya dari segi fisik saja yang aktif dan mentalnya tidak aktif, maka tujuan dari pembelajaran belum tercapai. Hal ini sama saja dengan peserta didik tidak belajar, karena peserta didik tidak merasakan perubahan dalam dirinya. Belajar pada hakikatnya adalah suatu “perubahan” yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas belajar (Djamarah dan Zein, 2014: 38)

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem, karena pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan, yaitu membuat siswa untuk belajar. Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar mengandung komponen. Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai komponen yang satu dengan yang lain saling terhubung, dimana pendidik harus memanfaatkan komponen tersebut dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang hendak direncanakan.

Adapun bagan komponen-komponen pembelajaran sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Komponen Pembelajaran**

a) Guru

Di dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Bab IV Pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, memiliki hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pada pendidik di Perguruan Tinggi.

Guru adalah pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam upaya memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam kegiatan pembelajaran (Nata, 2009: 315).

Menurut Freire, dalam proses pendidikan tugas guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan isi, atau sekedar sebagai subjek atau pelaku praktik yang netral yang hanya memindahkan pengetahuan yang netral saja. Tugas guru adalah memberikan makna yang lebih dalam dari isi atau materi yang diajarkan sebagai milik mereka sendiri.

Ada enam prinsip yang harus dipahami dan dipraktikkan dalam proses pendidikan oleh seorang guru, menurut Freire, yaitu: (1). Pendidik adalah subjek dari praktik pengajarannya, (2). Pendidik harus memberikan alat-alat untuk menciptakan dan mengulang praktik pengajaran yang dilandasi pemikiran-pemikiran atas rutinitas keseharian, (3). Pendidik harus secara konstan dan sistematis mempraktikkan pendidikan sebagai transformasi, (4). Praktik pendidikan mensyaratkan pemahaman tentang asal-usul ilmu pengetahuan itu sendiri, (5). Pendidikan diorientasikan pada proses reorientasi kurikulum sekolah, (6). Pendidik harus memiliki pandangan tentang sekolah yang dicita-citakan, sebagai horizon tawaran pendidikan yang baru, menyediakan komponen-komponen formatif dasar dalam bidang studi yang berbeda-beda, dan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas sekolah yang dicita-citakan sebagai kemajuan ilmiah (Freire, 2003: 63-69).

Dapat dipahami, bahwa guru merupakan komponen yang sangat menentukan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran dan menentukan hasil dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Strategi pembelajaran tidak dapat diaplikasikan tanpa adanya guru. Keberhasilan suatu penerapan strategi pembelajaran sangat tergantung dengan guru dalam menggunakan teknik dan taktik pembelajarannya yang dituangkan dalam metode belajar. Seorang guru yang memberikan materi pelajaran hanya sebatas mentransformasikan materi pelajaran akan berbeda dengan seorang guru yang menganggap bahwa mengajar adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik yang nantinya hasil belajarnya dapat tertanam dalam kehidupan masyarakat.

#### b) Siswa

Siswa adalah subjek dan objek dalam dunia pendidikan yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya dibawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Yang artinya siswa juga menjadi komponen pembelajaran.

Sama halnya dengan guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Terdapat siswa yang memiliki karakteristik serta kemampuan tinggim sedang hingga rendah. Perbedaan tersebut tentunya memerlukan perlakuan yang berbeda. Sikap dan penampilan siswa di dalam kelas juga merupakan aspek lain yang mempengaruhi proses pembelajaran (Sanjaya. 2010: 54).

Oleh karena itu peran siswa juga sangat mempengaruhi guru dalam proses pembelajaran begitupun sebaliknya. Bagi siswa, sebagai dampak pengiring (*nurturent effect*) berupa terapan pengetahuan dan atau kemampuan di bidang lain sebagai suatu hasil belajar yang akan membantu mereka berkembang mencapai kutuhan dan kemandirian.

Pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri siswa sebagai manusia dan dirinya sendiri. Pengenalan itu tidak cukup hanya bersifat objektif dan subjektif tapi harus kedua-duanya. Menurut Freire, siswa adalah subjektivitas dan objektivitas dalam pendidikan yang harus dihadapkan dengan polarisasi pendidikan hadap masalah yang nantinya siswa akan tergerak pemikirannya untuk kritis pada dunia sekitarnya.

#### c) Tujuan Pembelajaran

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan, karena hal itu adalah suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan ke arah mana kegiatan itu akan dibawa. Oleh karena itu tujuan tidak boleh dikesampingkan apalagi terabaikan oleh sekolah sebagai lembaga formal, guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik yang juga menjadi objek dan subjek pendidikan.

Tujuan merupakan komponen yang dapat mempengaruhi komponen pengajaran lainnya, seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber dan alat evaluasi. Semua komponen itu hrsrus bersesuaian dan didayagunakan untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Bila salah satu komponen tidak sesuai dengan tujuan, maka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Djamarah dan Zein, 2014: 42). Oleh karena itu, maka seorang guru tidak dapat mengabaikan masalah perumusan tujuan pembelajaran apabila hendak memprogramkan pengajarannya.

Bagi Freire, sistem pendidikan sebaliknya justru harus menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia. Sistem pendidikan mapan selama ini telah menjadikan anak

didik sebagai manusia-manusia yang terasing dan tercerabut daru realitas dirinya sendiri dan realitas dunia sekitarnya, karena ia telah mendidik mereka menjadi ada dalam arti menjadi seperti orang lain (seperti gurunya dalam sekolah gaya bank), bukan menjadi dirinya sendiri.

Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif. Dengan kata lain, dalam pendidikan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Nilai-nilai itu nantinya akan mewarnai cara anak didik bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosialnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

#### d) Materi Pelajaran

Materi pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan pelajaran proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Karena itu guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai bahan yang akan disampaiannya pada peserta didik.

Materi adalah salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Bahan yang disebut sebagai sumber belajar (pengajaran) ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran (Sudirman, N.K, 1991: 203). Materi pelajaran menurut Dr. Suharsimi Arikunto (1990) merupakan unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar, karena memang bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh peserta didik. Oleh karena itu guru khususnya atau pengembang kurikulum umumnya tidak boleh lupa harus memikirkan sejauh mana bahan-bahan yang topiknya tertera dalam silabi berkaitan dengan kebutuhan peserta didik pada usia tertentu dan dalam lingkungan tertentu pula.

Minat peserta didik akan bangkit bila suatu materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Maslow berkeyakinan bahwa minat seseorang akan muncul bila sesuatu itu terkait dengan kebutuhannya (Sudirman, A.M, 1988: 81). Jadi, materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik akan memotivasi peserta didik dalam jangka waktu tertentu.

Bagi Freire, dari sudut pandang metodologis atau sosiologis, buku-buku yang ditulis secara mekanis, betapa pun baiknya tetap tidak dapat menghapuskan “dosa aslinya” sebagai alat ‘penyetor’ kata-kata kepada siswa. Dan jika kemampuan mengajara dan kreativitas guru itu rendah, berarti mereka senantiasa memelihara alat tersebut (Freire, 2007:36).

Hampir semua kata dalam teks itu tidak berkaitan dengan pengalaman nyata siswa. Jika pun ada kaitannya, maka pengungkapannya begitu direkayasa dan paternalistik dan Freire yakin sifatnya pasti kekanak-kanakan.

Lantas manfaat apakah yang bisa diperoleh masyarakat desa dan urban dari pembelajaran yang seperti itu bagi kehidupannya di dunia ini? bagaimana mereka bisa kritis dapat memahami kehidupan mereka yang tertindas jika mereka hanya diperintah (walaupun) secara halus untuk mempelajari teks seperti “sayap burung” atau “Eva melihat buah anggur”.

Dengan menggunakan kata-kata yang bermuatan ideologis, buku-buku itu justru semakin memperkuat budaya bisu yang telah menghinggapi kebanyakan orang. Buku semacam itu tidak dapat dijadikan alat pembelajaran menuju transformasi sosial yang sesungguhnya. Oleh karena itu buku/alat pembelajaran mesti sesuai dengan realitas sosial yang telah dialami atau akan dialami oleh peserta didik sehingga menjadikannya kritis dan aktif dalam merubah tatanan kehidupannya sendiri dalam masyarakat.

e) Metode

Menurut J.R David dalam *Teaching Strategies for Collage Class Room* yang dikutip oleh Abdul Majid mengatakan bahwa pengertian metode adalah cara untuk mencapai sesuatu. Untuk melaksanakan suatu strategi digunakan seperangkat metode pembelajaran tertentu. Dalam pengertian demikian ini, maka metode pembelajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi belajar mengajar. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran (Majid, 2014: 132).

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak harus terpaku dengan menggunakan satu metode, tetapi guru sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi agar jalannya pengajaran tidak membosankan, tetapi menarik perhatian anak didik. Oleh karena itu, disinilah kompetensi guru diperlukan dalam pemilihan metode yang tepat.

Pemilihan dan penggunaan metode yang bervariasi tidak selamanya menguntungkan bila guru mengabaikan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya. Prof. Dr. Winarno Surackmad, M. Sc. Ed, mengemukakan lima macam faktor yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar sebagai berikut (Djamarah dan Zein, 2014: 46):

1. Tujuan yang berbagai-bagai jenis dan fungsinya;
2. Anak didik yang berbagai-bagai tingkat kematangannya;
3. Situasi yang berbagai-bagai keadaannya;
4. Fasilitas yang berbagai-bagai kualitas dan kuantitasnya;
5. Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda.

Menurut Freire, hal utama dan pertama yang harus dipahami adalah dialog yang membebaskan bukan teknik, dan dialog itulah yang akan membantu untuk mendapatkan satu hasil. Freire sendiri tidak memahami dialog sebagai taktik atau teknik yang menjadikan siswa sebagai mitranya. Apabila belum memahami dengan cara demikian, maka dialog hanyalah teknik untuk manipulasi, bukan untuk mencerahkan dan praktek *dehumanisasi* tetap saja berlangsung.

Manusia adalah makhluk komunikatif yang berkomunikasi satu dengan lainnya manakala kita lebih mampu mentransformasi realitas sekitar, sehingga kita tahu bahwa kita tahu dan itu adakah sesuatu yang lebih dari sekedar tahu. Sebaliknya, dialog harus dipahami sebagai sesuatu yang terlihat di dalam sejarah umat manusia. Ia adalah bagian dari kemajuan historis dalam tingkah laku manusia. Oleh karena itu. Dialog adalah postur yang membuat manusia menjadi makhluk yang sangat komunikatif-kritis. Dialog adalah momen ketika manusia memerlukannya untuk merefleksi-aksi realitas yang diciptakannya.

f) Alat

Alat pembelajaran adalah media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pembelajaran agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Alat atau media pembelajaran dapat berupa orang, makhluk hidup, benda-benda, dan segala sesuatu yang dapat digunakan guru sebagai perantara untuk menyajikan bahan pelajaran ( Siddik, 2006: 142).

Alat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu alat dan alat bantu pengajaran. Yang dimaksud dengan alat adalah berupa suruhan, perintah, larangan dan sebagainya. Sedangkan alat bantu pengajaran adalah berupa globe, buku, papan tulis, penghapus, spidol, gambar, diagram, slide, video dan sebagainya.

Penggunaan alat dalam pembelajaran haruslah disesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung. Media atau alat pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan

materi yang diajarkan, dengan adanya alat pembelajaran sudah seharusnya dapat memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran sehingga tujuan dari materi yang disampaikan dapat dicapai oleh siswa

g) Evaluasi

Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam pembelajaran, akan tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik guru atas kinerja yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi dapat diketahui kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen dalam pembelajaran (Sanjaya, 2010: 61).

Menurut Wayan Nurkencana dan P.P.N. Sumartana (1983: 1) evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai sebagai sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Sedang pendapat lain diutarakan oleh Ny. Drs. Roestiyah N.K (1989: 85) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui sebab-akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar.

Evaluasi tergantung pada tujuan dan pemahaman yang jelas tentang bagaimana kesadaran bekerja. Tanpa evaluasi yang objektif atas hasil-hasil dari program penyadaran, sumber-sumber yang digunakan dalam program tersebut tidak memiliki justifikasi yang kuat dan umpan balik yang bermanfaat untuk meningkatkan program-program pendidikan ini tidak mungkin bisa diperoleh karena sumber-sumber tersebut terbatas maka evaluasi memainkan peran penting.

Dengan adanya evaluasi dalam pembelajaran guru akan mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Apabila dalam proses pembelajaran tidak ada evaluasi, maka guru, siswa, orangtua/wali siswa serta lembaga terkait tidak akan mengetahui hasil yang diperoleh dari pembelajaran yang telah siswa lalui dalam praktek belajar mengajarnya di bangku sekolah. Oleh karena itu, evaluasi sangatlah penting dalam proses belajar mengajar.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah meneliti mengenai pemikiran Paulo Freire tentang politik pendidikan atau penelitian mengenai pemikiran Paulo Freire diantaranya:

- a. Penelitian oleh *Rosa Tosaini* (2005) berjudul “Konsep Pedagogi Pengharapan Paulo Freire sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Pendidikan Anak Jalanan di Indonesia (Telaah Filsafat Pendidikan)”, Penindasan merupakan suatu situasi di mana seseorang tidak dapat merasakan kebebasan dan menjadi diri sendiri secara utuh, akibatnya orang yang tertindas tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam hidupnya dan hal tersebut berpengaruh pada kesejahteraan diri dan lingkungan di sekitarnya. Maka kesadaran untuk berjuang ke arah pembebasan perlu di lakukan, agar manusia dapat menjadi dirinya sendiri, menjadi pribadi utuh yang tentu akan berpengaruh pada perubahan sosial baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya.
- b. Penelitian oleh *Nuraini* (2003) yang berjudul “Dialog sebagai Sebuah Metodologi Pendidikan Alternatif (Telaah Pemikiran Paulo Freire)”, Pendidikan adalah pengembalian jati diri manusia sebagai manusia yang merdeka, berhak untuk hidup, tidak tertindas, dan tidak diberlakukan secara sewenang-wenang. Pendidikan adalah proses yang senantiasa berlangsung sepanjang peradaban manusia. Pendidikan saat ini belum mampu memberikan kontribusi atas ketimpangan realitas sosial yang terjadi saat ini. Konsep pendidikan kritis berbasis metodologis dialektis menurut Paulo Freire hadir untuk memberikan jawaban atas persoalan pendidikan saat ini.

Adapun persamaan dan perbedaan diantara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan kedua penelitian terdahulu diatas.

- a. Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dari kedua penelitian terdahulu tersebut yaitu adanya kesatuan antara penindasan dan pembebasan. Manusia yang tertindas maka dirinya tak akan merasa bebas dan merdeka sehingga dibutuhkan suatu alat yang dapat dijadikan suatu harapan, dinamakan pendidikan sebagai wujud dari gairah manusia melawan penindasan dan mewujudkan pembebasannya secara terdidik dengan pendekatan metodologi yang tepat.
- b. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari kedua penelitian terdahulu tersebut yaitu pada Tesis Rosa Tosaini objek yang ditelitinya lebih kepada nilai-nilai pengharapan pendidikan kepada kaum marjinal, yakni anak

jalanan sedangkan penulis secara objektifitas penelitian ada kaitannya antara konsep pendidikan Paulo Freire dan falsafah negara yang diturunkan pada kebijakan negara (politik) dengan pendidikan yang relevan yang terjadi di Indonesia. Dan pada penelitian terdahulu skripsi Nuraini objek yang ditelitinya melalui dialektika pendidikan kritis dengan masyarakat sebagai sumber belajarnya, sedangkan penulis secara objektifitas penelitiannya menempatkan budaya dan konsep Paulo Freire sebagai acuan untuk menciptakan pembebasan, kekuasaan dan pendidikan suatu negara dengan kebijakan politik.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Penulisan kerangka berpikir disini adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami kejelasan dari isi skripsi ini. Selain itu, penulis juga dapat lebih fokus dalam membahas mengenai analisis dialektis dalam buku politik pendidikan: kebudayaan, kekuasaan dan pembebasan Paulo Freire dan kaitannya di Indonesia.

Tujuan pendidikan Freire adalah membangun suatu proses pendidikan yang disebutnya "penyadaran" (*Conscientization*) yang dibangun dalam realitas sosial dan kultural guru dan murid. Dari realitas ini, unsur-unsur tematik, isi, keputusan pedagogis akan muncul. Perpaduan antara teori dan praktik ini memberikan sumbangan bagi kekuatan dan pengaruh gagasan Freire. Dalam pengertian kongkret, metode "penyadaran" dalam proses melek huruf, pada dasarnya dibentuk oleh proses coding dan decoding (mengubah sesuatu menjadi kode dan mengubah kode menjadi sesuatu yang dapat dipahami) terhadap makna-makna linguistik dan sosial yang dijalankan dengan beberapa tahap.

Dalam analisis Freire, kesadaran masyarakat yang dianalogikannya dalam sebuah kode itu dibedakan atas 3 fase, yakni kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis. Setiap fase dibagi menjadi tiga aspek berdasarkan tanggapan responden dari pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apa masalah yang paling dehumanitatif dalam kehidupan kalian? (Penamaan);
- b. Apa penyebab dan konsekuensi dari masalah-masalah tersebut? (Berpikir); dan
- c. Apa yang dapat dilakukan untuk dapat memecahkan masalah-masalah tersebut? (Aksi).

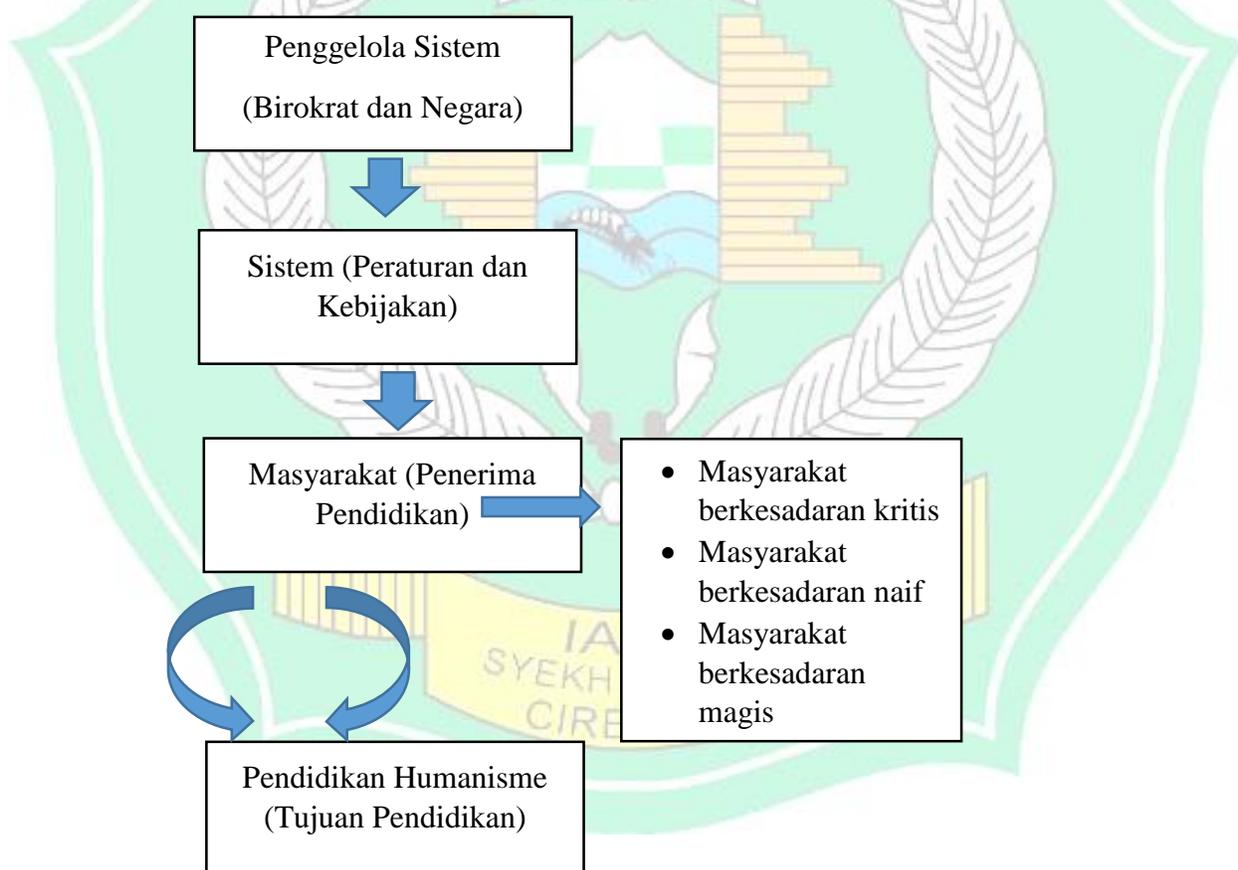
Pada bagian terakhir ini akan menjelaskan bagaimana seseorang individu menamakan, memikirkan dan bertindak secara berbeda dalam setiap fase konsientisasi (penyadaran). Fase-fase ini secara sederhana dapat digambar dalam skema sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Kerangka Berfikir**

	Kesadaran Magis “menyesuaikan”	Kesadaran Naif “memperbaharui”	Kesadaran Kritis “mengubah”
<b>Penamaan:</b> “Apa masalahnya?”	Menolak dan menghindari masalah	Penyimpangan terhadap pelaku penindasan (tidak patuh dan tidak suka)	Penolakan secara tegas (memelihara etnis) dan mengubah system
<b>Berfikir:</b> Mengapa terjadi? Siapa yang salah?	menyerah pada keadaan (Tuhan, nasib, keberuntungan, dsb)	Mengetahui pelanggaran yang terjadi tapi tetap tunduk pada ideology, dan menerima penjelasan	Megetahui sistem sebagai penyebab, mengerti jalanya sistem, mengetahui pertentangan antara cara dan tujuan.
<b>Aksi:</b> Apa yang bisa dan harus dilakukan? Apa yang sudah dilakukan?	Melarikan diri, menyerah, mengikuti sistem, menunggu keberuntungan (bertindak pasif)	Masih bekerjasama dengan penindas(kolusi) bertahan	Aktualisasi diri: menentang sistem, menerapkan solusi baru. Mengubah sistem:

			berdialog tanpa polemic, kerjasama, pendekatan ilmiah, mengubah norma, prosedur dan hukum.
--	--	--	--

Konsep pendidikan Freire ini juga disajikan dalam bentuk skema atau membentuk bagan seperti berikut ini :



**Gambar 2.2 Kerangka Berfikir**

Masyarakat berkesadaran magis pada gambar diatas ada pada tangga paling bawah, itu menunjukkan posisinya yang jauh dari hakikat kebebasan. Masyarakat berkesadaran naif ada pada posisi tengah kendatipun posisinya dibawah masyarakat berkesadaran kritis namun dirinya belum dapat dikatakan sebagai pencipta kebebasan yang sesungguhnya. Sebab kendati sudah dapat memahami keadaan mereka tidak kunjung melakukan perubahan dengan alasan tidak memiliki cukup kekuatan untuk merubah, perubahannya adalah mereka tidak lagi diam atau bisu namun mereka dapat melakukan aksi berupa pemberontakan. Lain halnya dengan kelompok ketiga yaitu masyarakat berkesadaran kritis, dengan bekal fikiran (intelektualnya) kritisnya mereka upayakan sepenuhnya untuk dapat berjuang dan merubah keadaan agar menjadi lebih baik dan membebaskan. Masyarakat inilah yang merupakan tujuan yang ingin diwujudkan Freire dalam mencapai cita-cita pendidikan humanistiknya yaitu membentuk manusia berkesadaran kritis untuk mencapai suatu pembebasan.

Masyarakat berkesadaran magis membuat kehidupan terasa aman, nyaman dan damai bagi sudut pandang penguasa, karena mereka cenderung pasif dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini yang disukai oleh penguasa (pemerintah) sebagai pencipta kebijakan, karena masyarakat ini cenderung untuk apatis dan bergerak statis (pasrah akan takdir) dalam alur kehidupan berbangsa sehingga penguasa dengan mudah leluasa dalam menentukan politiknya dalam bidang pendidikan ini. Lain halnya dengan masyarakat dengan kesadaran naif. Mereka mengetahui polemik pendidikan namun tak mempunyai kekuatan dan keinginan untuk merubahnya menjadi hal yang semestinya telah mereka pikirkan dalam gagasan dan konsep pendidikan yang di dambakan oleh masyarakat berkesadaran ini. Hal ini jelas masih menjadi suatu hal yang disayangkan, karena mereka memiliki inisiasi pemberontakan namun dapat teredam oleh kekuasaan dan kebudayaan yang tidak memihak terhadap mereka sehingga mereka tetap menunggu perubahan yang terjadi meskipun telah mereka suarakan aspirasinya kepada penguasa. Sedangkan masyarakat berkesadaran kritis inilah yang menjadi pembeda diantara masyarakat berkesadaran lainnya. Mereka memiliki mobilitas sosial yang dinamis untuk mewujudkan suatu cita-cita menuju kemajuan yang memaslahatkan masyarakat lainnya meskipun mereka terlihat pemberontak atas kebijakan pendidikan yang tak semestinya dijalankan namun mereka memperjuangkannya untuk menjawab tantangan pendidikan yang menurut mereka harus sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang membawa masyarakat menuju pembebasan seutuhnya dalam menuangkan pendidikan humanistik.

Pembebasan merupakan wujud akhir dari bentuk aktualisasi diri masyarakat sebagai kesatuan yang memiliki kesadaran kritis, dinamis, mobilitas tinggi dan dialektis dalam menjawab suatu polemik yang terjadi di ruang pendidikan dan kehidupan sosial lainnya. Mereka yang merdeka adalah mereka yang bebas untuk berkeinginan dengan hasrat serta nurani dalam menentukan kehidupannya. Sehingga pendidikan hanyalah sarana menuju pendewasaan keilmuan serta sikap mereka atas realitas.

## 2.4 Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian *Library Research* (Studi Literatur). Maksudnya adalah suatu riset kepustakaan. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul yang akan diteliti (Hadi, 2015).

Studi kepustakaan menurut Nazir (2017) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Sedangkan menurut Endang AR (2009:80), Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut digunakan sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti yang banyak dilakukan oleh para ahli sejarah, sastra dan bahasa.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa metode *library research* adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah dan menganalisa buku-buku, literatur-literatur, majalah, catatan dan laporan-laporan yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti dan kemudian digunakan sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis.

### 2. Objek Penelitian

Penelitian ini dikhususkan pada pemikiran Paulo Freire tentang Pendidikan humanistik melalui pendekatan politik yang tidak lepas dengan unsur-unsur kebudayaan,

kekuasaan dan pembebasan. Objek studi pada judul penelitian ini adalah gagasan atau ide yang diambil dari buku karya Paulo Freire yang membahas tentang Politik Pendidikan dan juga karya-karya lainnya yang mendukung.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi dan metode hermeneutik. Menurut Sugiyono (2011: 329-330), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, ceritera, biografi, sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang berupa gambar, film, patung dan lain-lain. sedangkan menurut Herdiansyah (2010: 145-146), dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau peneliti sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Jika dilihat dari dua definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini. metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari buku-buku atau literatur karya Paulo Freire dan literatur dari buku-buku yang membahas tentang otobiografi dari pemikiran humanisme Paulo Freire.

Adapun data yang digunakan penulis meliputi:

- a. Sumber data primer, di mana dalam hal ini sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku karya Paulo Freire secara langsung dan buku yang membahas pemikiran Paulo Freire tentang Politik Pendidikan seperti: *Pendidikan Kaum Tertindas, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, dan Pendidikan Sebagai Proses.*
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini data sekunder mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan otobiografi Paulo Freire dan Pemikiran Pendidikan Humanisme Paulo Freire. Misalkan, berbagai macam literatur yang

berhubungan dengan objek penelitian seperti buku, artikel, media sosial (Herdiansyah, 2010: 137).

Selain itu penulis juga menggunakan metode hermeneutik dalam penelitian ini. Hermeneutika berasal dari kata Yunani *hermeneuine* dan *hermeneia* yang masing-masing berarti “menafsirkan” dan “penafsiran”. Dalam tradisi Yunani, istilah hermeneutika diasosiasikan dengan Hermes (Hermeios), seorang utusan (dewa) dalam mitologi Yunani Kuno yang bertugas menyampaikan dan menterjemahkan pesan dewa ke dalam bahasa manusia (Raharjo, 2008: 27-28).

E. Sumaryono menjelaskan bahwa hermeneutika merupakan proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (E. Sumaryono, 1999: 24). Sedangkan menurut Fakhruddin Faiz, hermeneutika sebagai suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya, untuk itu metode ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang (Raharjo, 2008: 29).

Wilhelm Dilthey mengatakan bahwa sebagai bagian dari metode *verstehen* (fakta yang terdapat dibalik kenyataan langsung), tugas pokok hermeneutik adalah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik atau realitas sosial di masa lampau yang sama sekali agar menjadi milik orang yang hidup dimasa, tempat dan suasana kultural yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan hermeneutika selalu bersifat triadik, menyangkut tiga subjek yang saling berhubungan. Tiga subjek yang dimaksud meliputi: *the world of the text* (dunia teks), *the world of the author* (dunia pengarang), dan *the world of the reader* (dunia pembaca) yang masing-masing memiliki titik pusaran tersendiri dan saling mendukung dalam memahami sebuah teks (Mulyono, 2012:100).

#### 4. Metode Analisis Data

Merujuk pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah library research, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis isi atau *content analysis* yang pertamakali digunakan oleh Harold D. Laswell. Menurut Holsti, analisis ini adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Sedangkan

menurut Wimmer dan Dominick mengartikan analisis isi sebagai prosedur yang sistematis yang dirancang untuk menguji isi informasi yang direkam (Kholil, 2006: 51).

Berdasarkan dua pendapat tokoh di atas, maka analisis isi adalah suatu prosedur yang sistematis yang dirancang untuk menguji informasi untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa isi dari literatur-literatur karya Paulo Freire yang berkaitan dengan pendidikan humanis dan karya-karya lain yang mendukung.

Secara lebih terperinci, penulis menjabarkan langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan. Yaitu sebagai berikut (Moloeng, 2004: 248):

- a. Membaca atau mempelajari data dengan kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- b. Mengumpulkan, memilih-milah, mengklasifikasikan dan membuat indeksinya.
- c. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.

Dalam membahas data-data tersebut, penulis menggunakan metode induktif, yaitu analisis data yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian ditarik generalisasi dari hal-hal khusus tersebut sehingga bersifat umum. Adapun penggunaannya dalam kajian ini adalah sebagai generalisasi dari fakta-fakta maupun teori-teori yang telah ada dan dikembangkan.

## 5. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan faktor untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian yang telah dikumpulkan. Berpedoman kepada pendapat Lincoln dan Guba dalam Salim dan Syahrur (2012: 165), untuk mencapai *trustworthiness* (kebenaran), dipergunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas yang terkait dengan proses pengumpulan dan analisis data.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sutopo (2002: 7-8) triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Menurut *Institue of Global Tech* yang tersedia secara online pada

<http://www.igh.org/triangulation/> diunduh pada tanggal 29 Januari 2019, menjelaskan bahwa triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Dengan cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metoda berbeda, oleh kelompok berbeda dan dalam populasi berbeda, penemuan mungkin memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal.

Dalam kaitan ini Patton (dalam Sutopo, 2002: 78) menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data (*data triangulation*) yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda, (2) triangulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, (3) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*) yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti, dan (4) triangulasi teori (*theory triangulation*) yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

## 6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis secara sistematis dengan sistematika skripsi yang terdiri dari:

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus kajian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II, berisi mengenai landasan teori yang di dalamnya membahas lebih mendalam mengenai judul skripsi yaitu analisis dialektis dalam buku politik pendidikan: kebudayaan, kekuasaan dan pembebasan Paulo Freire dan kaitannya di Indonesia.

Bab III, berisi tentang metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang tersusun berdasarkan rumusan masalah penelitiannya yakni: Konsep Politik Pendidikan Paulo Freire, Pengaruh Politik Pendidikan Paulo Freire di Indonesia dan Aktualisasi Politik Pendidikan Paulo Freire di Indonesia

Bab V, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atas apa yang telah peneliti lakukan selama penelitiannya.

